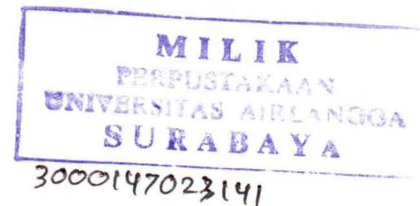




LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2000

OBJEKTIFITAS PEMBERITAAN PERS NASIONAL



Peneliti :

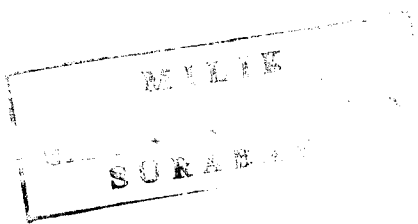
Drs. HENRY SUBIAKTO, SH.,MA.
Drs. YAN YAN CAHYANA, MA.
Dra. SRI MOERDIATI, MS.
Dra. RACHMAH IDA, MA.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIK Rutin Universitas Airlangga 2000
Nomor SK. Rektor 4935/JO3/PG/2000
Nomor Urut : 18

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Januari, 2001



**LEMBAGA PENELITIAN**

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Obyektifitas Pemberitaan Pers Nasional
- b. Macam Penelitian : () Fundamental. (V) Terapan. () Pengembangan
- c. Kategori Penelitian : () I (V) II () III
2. Kepala Proyek Penelitian
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Henri Subiakto. SH..MA.
 - b. Jenis Kelamin : Laki - Laki
 - c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata / IIIc - 131 801 645
 - d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
 - e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
 - g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Komunikasi Massa
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 (Empat) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
 - a. Nama Instansi : -
 - b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.000.000.00
8. Seminar Hasil Penelitian
 - a. Dilaksanakan Tanggal : 29 Januari 2001
 - b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 29 Januari 2001

Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian.

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.

NIP. 130 701 125

3000147023141

SURABAYA

RINGKASAN PENELITIAN

A. Judul Penelitian : OBYEKTIFITAS PERS INDONESIA

Peneliti : HENRI SUBIAKTO
RACHMAH IDA
YAN YAN CAHYANA
SRI MOERDIJATI

Tahun : 2000/2001/ 57 halaman

B. Ringkasan Penelitian

Akhir-akhir ini sering pemberitaan-pemberitaan media yang tendensius. Seringkali ulasan sebuah peristiwa yang diangkat oleh pers kita mencampurkan antara fakta atau realitas yang terjadi, dengan opini dari wartawan. Padahal idealnya, pers itu netral dan memberikan fakta atau gambaran realitas yang tidak keliru terhadap pembacanya.

Obyektifitas ini bisa ditempuh oleh institusi pers dengan cara melakukan *cover both side*, misalnya, dan memisahkan antara fakta dan opini wartawan kedalam ulasan pemberitaan. Hal demikian menjadi amat penting untuk diketahui, terutama bebarengan dengan agenda besar reformasi politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Bagaimana surat kabar-surat kabar besar memberitakan isu-isu politik selama berlangsungnya Pemilu hingga Sidang Umum? Menjadi persoalan yang amat menarik untuk diteliti. Karena dengan suatu penelitian *content analysis*, kita dapat mengetahui surat kabar mana saja yang relatif lebih *fair*, valid, dan akurat dalam memuat berita-berita politiknya untuk disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana akurasi pemberitaan surat kabar dalam memuat berita utama (*headline*), berita politik?; (2) Bagaimana *fairness* (ketidakberpihakan) pemberitaan surat kabar dalam *headline* berita politik?; (3) Serta bagaimana pula validitas (keabsahan) berita yang ditulis sebagai *headline* tersebut?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Dapat diketahui bagaimana akurasi pemberitaan surat kabar dalam *headline* berita politik; (2) Dapat diketahui bagaimana *fairness* pemberitaan surat kabar dalam *headline* yang memuat berita politik; (3)

Mengetahui validitas *headline* yang diberitakan. Dengan mengetahui itu semua maka dapat diketahui pula obyektifitas dari berita yang diteliti.

Penelitian ini mempunyai dua signifikansi atau manfaat, yaitu praktis dan akademis. Dari manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat diketahui surat kabar mana yang dalam *headline* berita politiknya paling akurat, seimbang, dan valid. Dengan hasil itu, akan dapat diketahui media manasaja di Indonesia yang termasuk dalam kategori *the fairest and most accurate news paper in the political news* di Indonesia. Hasil inilah yang kemudian diberikan sebagai masukan bagi media-media yang diteliti untuk lebih meningkatkan kualitas pemberitaannya, sekaligus koreksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Sedangkan manfaat akademis adalah memberikan kontribusi tentang pengembangan konsep obyektivitas pemberitaan pers, bagaimana mengukurnya, dan apa kaitannya dengan konsep-konsep lain seperti, impartial, faktual dan fairness.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Yang dilakukan terhadap 8 (delapan) surat kabar Indonesia yang beroplah lebih dari 100,000 eksemplar, antara lain: *Kompas*, *Media Indonesia*, *Suara Pembaruan*, *Surya*, *Jawa Pos*, *Suara Merdeka*, *Pikiran Rakyat*, dan *Republika*. Unit analisis yang diteliti adalah item berita, dengan melihat pemilihan kata dan bahasa yang ada dalam pemberitaan yang terletak di *headline* surat kabar. Berita-berita yang diteliti adalah mulau bulan Januari – April 2000, dengan jumlah berita sebanyak 800 item berita.

Untuk mengukur kadar obyektifitas media massa tersebut maka dilakukan kategorisasi yang terdiri dari derajat keakuratan yang menyangkut kejujuran berita dari kesesuaian judul dan isi, pencantuman waktu, penggunaan data pendukung, dan faktualitas berita. Selain itu kategorisasi *fairness* meliputi ketidak berpihakan media yang dilihat dari sisi bahasa/pemilihan kata dan ukuran centimeter kolomnya. Kategori berikutnya adalah validitas keabsahan dengan indikator atribusi atau pencantuman sumber berita dan kompetensi sumber yang diliput. Sementara itu analisis data dilakukan dengan menyajikan tabel frekuensi sekaligus juga analisis-analisis kualitatif terhadap temuan data yang diperoleh.

Hasil temuan data menyimpulkan bahwa surat kabar *Suara Pembaruan*, *Kompas*, *Suara Merdeka*, dan *Media Indonesia* adalah media massa di Indonesia yang cenderung

obyektif dibandingkan media massa yang lain dalam hal keakurasian pemberitaan, validitas nara sumbernya dan ketidakberpihak pada pihak manapun. Walaupun tidak ada salah satu media yang benar-benar telah menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme obyektif, tapi paling tidak media –media di atas dianggap mampu untuk memisahkan fakta daripada opini dan dinilai cenderung untuk tidak melakukan provokasi massa ,dan sebagainya.

Sementara itu surat kabar *Republika*, *Jawa Pos*, *Pikiran Rakyat*, dan *Surya* masih mengalami persoalan dengan obyektifitas. Artinya keempat surat kabar ini terlihat sekali berpihak pada pihak-pihak tertentu dan berkecenderungan menggunakan opini wartawan daripada fakta-fakta akan realitas yang senyatanya.

(Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
(No. Kontrak: 4935/J03/P6/2000)

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang obyektifitas pers ini ditujukan untuk melihat sejauh man pers kita menerapkan azas-azas jurnalisme obyektif. Hal ini mengingat pers mempunyai peran penting dan krusial dalam pembentukan dan pembangunan negara ke arah demokratisasi.

Namun seiring dengan selesainya penelitian ini, maka puji syukur alhamdulillah kami haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberi kekuatan dan bimbingan sehingga karya tulis ini akhirnya dapat terselesaikan.

Juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan dana penelitian ini. Kepada Lembaga Konsumen Media yang membantu dalam penyediaan data-data yang diperlukan. Serta kepada para junior kami IGAK. Satrya Wibawa, serta para mahasiswa yang telah membantu penelitian ini.

Akhir kata kami mengucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini yang tidak dapat kami perinci satu-persatu disini. Kami sangat mengharapkan masukan untuk kebaikan dan kelanjutan dari penelitian ini nantinya.

Surabaya, 1 Desember 2000

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
III. METODE PENELITIAN	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
V. KESIMPULAN DAN SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2	Tema Utama <i>Headlines</i>	31
Tabel 2.1	Kesesuaian Judul dengan Isi Berita	33
Tabel 2.2.	Pencantuman Waktu Peristiwa	34
Tabel 2.3.	Penggunaan Data Pendukung	36
Tabel 2.4.	Pencampuran Fakta Dengan Opini	38
Tabel 2.5.	Kesalahan Cetak dan Penulisan Istilah	39
Tabel 3.1.	Keseimbangan Berita Berdasarkan Sumber Berita yang Diberitakan	40
Tabel 3.2.	Keseimbangan Penulisan Berita dengan Jumlah Kolom Penulisan	42
Tabel 4.1.	Pilihan Sumber Berita Dalam Analisis/Komentar	44
Tabel 4.2.	Penulisan Sumber Berita Dalam Analisis/ Komentar	45
Tabel 4.3.	Luas Pemberitaan Dalam Analisis/Komentar	46
Tabel 4.4.	Kompetensi Sumber Berita	47
Tabel 4.5.	Identitas Nara Sumber	48
Tabel 4.6.	Luas Pemberitaan Kompetensi Sumber Berita	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Akhir-akhir ini kita sering membaca pemberitaan-pemberitaan media yang tendensius. Seringkali ulasan sebuah peristiwa yang diangkat oleh pers kita mencampurkan antara fakta atau realitas yang terjadi, dengan opini dari wartawan. Padahal idealnya, pers itu netral dan memberikan fakta atau gambaran realitas yang tidak keliru terhadap pembacanya.

Mulai lunturnya etika pers seperti akan sangat mengganggu khalayak pembacanya secara khusus, dan masyarakat luas secara umum. Gambaran realitas yang keliru akan membentuk opini atau image masyarakat terhadap sebuah peristiwa juga akan keliru. Berkali-kali pers memberitakan peristiwa-peristiwa yang tidak benar atau masih dalam desas-desus atau belum jelas kebenaran faktanya.

Padahal salah satu syarat menuju sebuah negara demokrasi adalah adanya kebebasan pers. Jika pers selalu dikontrol dan dikooptasi oleh negara, maka pers tidak akan mampu menjadi kekuatan yang mampu mengontrol pemerintah dan penguasa negara. Dengan tugasnya yang ideal dan mulia ini, pers harusnya benar-benar menjadi media atau saluran yang benar-benar mampu menyuarakan

aspirasi rakyat. Dengan kata lain karena tugas kontrol pers terhadap negara dan elit politiknya inilah, maka pers hendaknya menyiarkan informasi-informasi yang faktual, atau yang benar. Bukan desas-desus atau rumor yang belum tentu kebenarannya. Bahkan pers kita cenderung menyebarkan berita yang tidak jelas sumber beritanya dan tidak ada pertanggung jawabannya kepada rakyat.

Namun karena surat kabar dengan insan pengelolanya memiliki berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik, maupun ekonomi, ataupun juga ada keterbatasan profesionalisme maka tak jarang berita surat kabar tidak memenuhi tuntutan standar jurnalisme. Institusi pers haruslah obyektif dalam mengulas sebuah fakta dengan informasi yang diperolehnya. Obyektif dalam arti akurat dan tidak berpihak.

Keuntungan-keuntungan yang menguntungkan media massa sendiri seperti misalnya untuk mencari keuntungan komersial yang sebesar-besarnya, menjadikan media tidak obyektif dan tidak berorientasi kepada khalayak pembacanya. Tambahan lagi alasan ekonomi politik media lebih mengedepan dibandingkan fungsi dan peran normatifnya dalam memberikan informasi, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat.

Ideologi media massa yang berpihak pada peng-kayaan dirinya sendiri akan merugikan masyarakat dan khalayak konsumennya secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang terjadi kemudian? Media massa dinilai dan diklaim

banyak kalangan cenderung lebih banyak menyajikan opininya daripada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Coverage terhadap realitas dinilai subyektif dari visi pengelola media sendiri, dalam hal ini wartawan dan redaksi pelaksanaannya. Terkadang ownership atau kepemilikan media bisa juga mempengaruhi isi atau produksi pesan media massa. Karena kepentingan bisnis yang lebih mengedepan maka institusi media massa lalu cenderung bersikap provokatif dan membombardir realitas menjadi situasi yang memanas khalayaknya. Banyak sudah contoh-contoh bagaimana media/pers terutama sudah tidak menghiraukan prinsip-prinsip jurnalisme obyektif dan etika jurnalistik yang seharusnya. Banyak tulisan bernada panas dan melibatkan opini korannya sendiri kini beredar di masyarakat.

Hal yang tak kalah serunya beberapa institusi pers bahkan memihak kepada salah satu golongan jika terjadi konflik antar golongan di Indonesia. Dengan keberpihakannya pada salah satu golongan atau kelompok, maka pers dinilai sulit sekali untuk bisa bertindak mandiri/independen dan bebas dari segala kekuatan manapun yang akan merugikan institusi pers dan konsumennya.

Bukan tidak mungkin pers bahkan mampu menciptakan konflik itu sendiri, karena pers terjerumus dalam praktik-praktik provokasi yang dilakukan melalui isi pemberitaan kepada khalayaknya. Pers tidak menjadi penengah atau pihak alternatif yang netral dan mendamaikan khalayak, melainkan pers menjadi kekuatan lain dari perseteruan dan konflik yang terjadi itu sendiri.

Lihat saja beberapa contoh penggunaan judul-judul yang cenderung panas seperti "*Bakar-Bakaran di Bulan Mei*" yang dilakukan oleh tabloid Bangkit. Atau kalimat-kalimat judul, "*Timor-Timur Merdeka, Siapa Iku?*", juga judul-judul seperti "*Banyak Antek Orde Baru di Tubuh Majelis*", dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana judul-judul panas yang cenderung provokatif ini membahayakan kedamaian dan membangkitkan kegelisahan khalayak. Padahal kondisi atau realitas senyatanya tidaklah demikian halnya. Oleh karena itu perlunya terus menerus masyarakat yang berhak mengontrol institusi pers kita saat ini menyuarakan nilai-nilai normatif dan etika peliputan dalam kegiatan jurnalistik, dengan salah satunya mengkampanyekan perlunya obyektifitas pers.

Obyektifitas ini bisa ditempuh oleh institusi pers dengan cara melakukan *cover both side*, misalnya, dan memisahkan antara fakta dan opini wartawan kedalam ulasan pemberitaan. Hal demikian menjadi amat penting untuk diketahui, terutama bebarengan dengan agenda besar reformasi politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Bagaimana surat kabar-surat kabar besar memberitakan isu-isu politik selama berlangsungnya Pemilu hingga Sidang Umum? Menjadi persoalan yang amat menarik untuk diteliti. Karena dengan suatu penelitian *content analysis*, kita dapat mengetahui surat kabar mana saja yang relatif lebih *fair*, valid, dan akurat dalam memuat berita-berita politiknya untuk disampaikan kepada masyarakat.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana akurasi pemberitaan surat kabar dalam memuat berita utama (*headline*), berita politiknya?
2. Bagaimana *fairness* (ketidakberpihakan) pemberitaan surat kabar dalam *headline* berita politiknya?
3. Serta bagaimana pula validitas (keabsahan) berita yang ditulis sebagai *headline* tersebut?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Media Massa Dalam Masyarakat Demokratis

Peralihan sebuah perdaban dan pemerintahan sebuah masyarakat tentu juga akan mempengaruhi visi dan politik media massa yang hidup di dalamnya. Hal ini mengingat apa yang dikatakan oleh Siebert dkk (1986) dan juga Baran, dkk (1999) bahwa institusi media massa adalah bagian dari sistem masyarakat. Bahkan McQuail sendiri (1997,2000) menyatakan bahwa institusi media sama atau paralel dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam teorinya McQuail menjelaskan bahwa institusi media massa sendiri sebenarnya terletak antara lalu lintas kebudayaan masyarakat yang terwujud dalam produksi *content*/isi media, dan disisi lain berkaitan dengan struktur sosial masyarakat seperti adanya institusi-institusi politik, ekonomi, dan ideologi yang menjadi bagian dari sistem masyarakat dimana media massa itu hidup dan berkembang.

Demokratis tidaknya suatu negara akan bisa tercermin dari eksistensi media massanya. McQuail (2000) sekali lagi menyatakan bahwa sebenarnya media massa itu *powerless*. Artinya media massa bebas dari pengaruh kontrol pihak manapun termasuk pemerintah di dalamnya. Dalam masyarakat yang demokratis, media massa berperan aktif bahkan pro aktif dalam pembentukan kehidupan *civil society* yang demokratis, transparan, dan terbuka. Peran media massa yang tidak sederhana

ini harus terus digalakkan. Dalam arti pers mempunyai kebebasan untuk menjalankan fungsi jurnalistiknya dalam meliput, mengemas, mengelupas, dan memberikan analisis serta rekomendasi kepada masyarakat akan hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan, seperti kehidupan bernegara yang dilakukan oleh para elit pemerintahan dan para anggota legislatif dan yudikatif.

Dengan prinsip sebagai *the fourth estate* atau kekuasaan keempat dalam masyarakat demokratis, maka pers bertindak selaku penjaga gawang (*gate keeper*) sekaligus anjing penjaga (*the watch dog*) bagi jalannya kehidupan bernegara yang dilakukan oleh para elit politik dan para pemain politik lainnya serta partai-partai politik yang juga terlibat dalam kancah politik nasional. Sebagai pilar keempat dari kekuasaan, maka peran pers dalam negara demokrasi adalah melakukan kontrol sosial terhadap jalannya proses demokratisasi dan transparansi di wilayah negara tersebut (Siebert, dkk, 1986). Kontrol membangun yang dilakukan pers akhirnya mampu menciptakan suasana keterbukaan akan informasi kepada khalayak luas lewat prinsip-prinsip penjagaan gawang, dimana pers menjadi filter akan isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang di masyarakat. Sehingga pada akhirnya fungsi pengawasan yang dilakukan pers akan efektif.

Jika pers dengan kebebasannya mampu berperan aktif dalam mengontrol kinerja pemerintahan dan elit-elit yang berkuasa di dalamnya, lalu siapakah yang berhak mengontrol pers sebenarnya? Maka tak lain adalah khalayak atau masyarakat konsumen pers yang mempunyai hak untuk mengontrol media massa ini. Peran

serta aktif masyarakat dalam penciptaan iklim demokratis diperlukan guna membina kesadaran akan pentingnya hidup secara terbuka, transparan, dan diskusi serta dialog dalam sebuah *public sphere* yang bebas namun membangun. Kontrol dari masyarakat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi arti kebebasan pers itu sendiri, melainkan untuk menciptakan kehidupan pers yang sehat. Jika pers tidak kontrol, maka pers akan cenderung kebablasan, sehingga tujuan dan cita-cita mulia demokrasi tidak terpenuhi.

Disamping itu dalam penciptaan iklim demokratisasi pers dan media massa lain diharapkan mampu menumbuhkembangkan kehidupan yang menghargai HAM. Dimana dengan prinsip kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, menjadi beban yang harus dipikul oleh pers dan media massa. Sehingga media massa tidak menghakimi secara langsung yang akan menimbulkan terjadinya pelanggaran Hak-Hak Azasi Manusia oleh institusi pers dan media massa. Sebaliknya pers juga mempunyai hak-hak azasinya yang harus dilindungi. Oleh karena itu pers juga harus dijauhkan dari tindakan anarkis sewenang-wenang yang dilakukan oleh segolongan tertentu atau para pendukung partai politik untuk menindak pers secara sepihak.

2.2. Media Massa dan Representasi Realitas

Ada beberapa teori komunikasi memandang media massa sebagai perpanjangan alat indera manusia (Innis, 1951, McLuhan, 1996, Chafee, 1980). Teori semacam itu bertolak dari pemikiran, bahwa secara kodrati manusia mempunyai keterbatasan akses dalam memahami realitas dunia (Lippmann, 1922). Padahal setiap individu secara terus menerus harus membangun hubungan dengan dunianya, untuk proses perkembangan menjadi manusia. Karena itu individu selalu mengkonstruksikan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Hasil konstruksi itu mempengaruhi dan membentuk pikiran serta tindakan dalam interaksi sosial (Berger & Luckman, 1979: 13).

Karena keterbatasan alat indera dan mobilitasnya, manusia dalam menyusun dan mengorganisir realitas yang ada di luar lingkungannya senantiasa membutuhkan sarana untuk memperoleh gambaran mengenai realitas tersebut. Pada masyarakat tradisional, isyarat, simbol, dan berbagai lambang lain yang digunakan untuk menyusun pemahaman tentang realitas itu berasal dari komunikasi interpersonal. Sementara pada masyarakat modern, gambaran mengenai realitas dunia diperoleh dari media massa.

Gambaran akan realitas yang semu maupun realitas yang nyata dari setiap orang adakalanya memang dipengaruhi langsung oleh media. Seperti konsep *'hyper-reality'* misalnya, yang mengasumsikan bahwa image yang ada di benak khalayak tentang realitas yang digambarkan oleh media massa akan mempengaruhi khalayak bersikap terhadap realitas itu sendiri. Ilustrasi berikut ini akan menjelaskannya.

Seperti misalnya khalayak akan benci dan menentang segala tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat termasuk juga para pelaku atau penjahatnya hanya karena seringnya khalayak tersebut membaca berita-berita kriminalitas di masyarakat.

Empati khalayak akan muncul dengan hanya berkali-kali membaca betapa banyaknya korban-korban kejahatan yang seringkali dibacanya dari koran. Walaupun khalayak itu sendiri tidak pernah mengalaminya, dan atau kerabat dan teman terdekat mereka juga belum pernah mengalami aksi tindak kekerasan. Image dan empati yang muncul semacam inilah yang disebut dengan fenomena *hyper-reality* itu, yakni melihat realitas media seolah-olah realitas yang obyektif. Sehingga kecemasan sosial dan kepanikan moral yang dialami khalayak akan muncul karena seringnya media memuat berita-berita tentang kriminalitas itu.

Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Sebab itu media massa senantiasa dituntut mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia yang benar-benar terjadi. Maksudnya agar gambar realitas yang ada di benak khalayak -- *the world outside and the pictures in our heads*, demikian istilah Lippman (1922)-tidaklah menjadi bias dikarenakan informasi media massa yang tidak kontekstual dengan realitas. Jika terjadi bias akan realitas maka muncullah konsep kesadaran semu (*False Consciousness*) dalam diri khalayak (Berger, 1988).

Sebagaimana diketahui, salah satu media massa yang sarat dengan informasi adalah pers. Pers merupakan cermin realitas, karena pers pada dasarnya merupakan

media massa yang lebih menekankan fungsinya sebagai sarana pemberitaan. Isi pers yang utama adalah berita. Sementara itu, berita adalah bagian dari realitas sosial yang dimuat media, karena memiliki nilai yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat.

Pers atau dalam hal ini surat kabar dibutuhkan masyarakat tak lain karena informasinya, bukan kertasnya. Informasi itu sebagai dasar menentukan sikap, perilaku, atau pun *respond* terhadap berbagai hal, termasuk persoalan politik. Disinilah sebagai institusi, surat kabar mempunyai tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi. Karena etos dasar pers -menurut Magnis Suseno- tak lain adalah etos kebenaran. Kebenaran dalam pengertian etis ini adalah memberitakan keadaan sebenarnya (Suseno; 1986:122).

Persoalannya kemudian adalah, bagaimana yang dimaksud memberitakan keadaan sebenarnya itu? Apakah ini dimaksudkan untuk mengungkap semua peristiwa yang mempunyai nilai berita sepanjang signifikan terhadap kebutuhan khalayak, baik yang tersembunyi, ataupun tidak, ataupun realitas yang sensitif maupun yang tidak? Jawabannya adalah "ya". Tetapi tidak cukup itu. Tuntutan profesional media sebagai sarana pengungkap realitas, bukan hanya pada kemampuan mengungkap ragam realitas, yang dulu agak sulit dipenuhi di Indonesia semasa sebelum reformasi. Namun tuntutan itu juga menyangkut tentang bagaimana realitas tersebut digali dan disajikan, apakah media massa telah menggali dan meyajikan realitas secara benar atukah belum? Apakah yang diungkap itu

merupakan informasi yang mencerminkan secara obyektif dan akurat terhadap realitas yang benar-benar terjadi, ataukah tidak? Jangan-jangan informasi realitas itu hanyalah realitas menurut persepsi wartawan, atau dunia subyektif wartawan. Inilah makanya diperlukan suatu pemahaman agar wartawan mampu melakukan jurnalisme yang obyektif, sekaligus melakukan jurnalisme presisi yang memungkinkan terjadinya pengungkapan realitas secara lebih akurat.

2.3. Obyektifitas Pemberitaan

Kebebasan pers yang dirasakan sejak reformasi, telah memungkinkan para wartawan mengungkap berbagai ragam realitas, dari yang biasa hingga yang paling sensitif. Dari sisi negatif individu yang ada di luar struktur kekuasaan, hingga mengkritisi pusat kekuasaan utama, baik lembaga kenegaraan, personal pejabat, maupun institusi tentara. Keberanian mengungkap keberagaman realitas hingga saat ini, sebenarnya sudah cukup memperlihatkan kebebasan pers. Akan tetapi mengenai kualitas obyektivitas dan akurasi berita yang diungkap, adalah suatu persoalan lain.

Dalam keseharian, pengungkapan realitas oleh wartawan acapkali diwarnai oleh kecenderungan-kecenderungan tertentu. Obsesi media atau wartawan acapkali muncul dalam wujud usaha menciptakan atau mengubah suatu realitas tertentu. Hal itu berkait dengan persepsi atau definisi yang dipunyai wartawan tentang realitas peran dirinya, dan realitas sosial yang ada di sekitarnya. Wartawan yang -- misalnya saja -- mempersepsikan dirinya sebagai "penegak moralitas sosial", akan



cenderung untuk menggali dan menyajikan berita-berita dari sisi kerusakan moral. Mereka secara tidak sadar akan mengharapkan terdapat realitas yang dapat memperkuat perannya untuk mengungkap terjadinya kerusakan moral. Perspektif individu wartawan untuk melihat realitas menjadi bias sesuai dengan predisposisi persepsi dirinya. Prasangka ataupun *prejudice* acapkali muncul terlebih dahulu, sebelum si wartawan mengumpulkan banyak data untuk menuliskan laporan pemberitaannya. Walhasil berita pelaporan wartawan demikian sarat dengan pengamatan wartawan yang khas, dan lebih didasarkan pada persepsi, bukan dari data yang nyata yang diungkap secara ilmiah.

Metode non ilmiah yang sering dipakai kalangan wartawan untuk mengungkap realitas adalah *method of tenacity*, *method of authority* dan juga *method of intuition* (atau *a priori method*). *Method of tenacity* dalam mengungkap realitas mendasarkan diri pada logika, bahwa sesuatu hal adalah benar karena kita yakin hal tersebut selalu kita temui kebenaran-kebenarannya. *Method of authority*, melihat kebenaran realitas berdasarkan fakta bahwa hal tersebut dibenarkan oleh sumber-sumber yang kompeten atau bisa dipercaya (pakar, saksi mata dsb). Sedangkan *method of intuition* atau *a priopri method*, berasumsi bahwa sesuatu itu benar sejauh intuisi atau nalar kita mengatakan demikian (Kerlinger 1973: 5).

Metode-metode non ilmiah inilah yang nampaknya selama ini justru lebih sering digunakan para wartawan atau pengelola media dalam usaha mereka untuk

mengetahui atau menjelaskan suatu realitas. Upaya-upaya yang lebih ilmiah untuk mewujudkan jurnalisme obyektif justru agak sedikit mendapat tempat.

Dalam jurnalisme, kebenaran tidaklah bisa diklaim oleh satu pihak. Tapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran dari pihak lain. Inilah mengapa pemberitaan di surat kabar senantiasa dituntut untuk mengungkapkan kebenaran secara *fairness*. Yaitu salah satu syarat objektivitas berita yang acap dikenal dengan istilah pemberitaan *cover both side*, dimana pers menyajikan semua pihak yang terlibat sehingga pers mempermudah pembaca menemukan kebenaran (Siebert, dkk: 1986:100). Selain tuntutan pemberitaan yang fair, pers juga dituntut melakukan pemberitaan yang akurat, yang tidak boleh berbohong, menyatakan fakta jika itu memang fakta, dan pendapat jika itu memang pendapat (Siebert, dkk: 1986:99).

Sementara dalam konsepsi yang sama Everette Denis dan DeFleur dalam buku *Understanding Mass Communication*, menunjukkan bahwa pers senantiasa dituntut mengembangkan pemberitaan yang objektif, yaitu "*reporting format that generally separates fact from opinion, presents an emotionally detached view of the news, and strives for fairness and balance*" (DeFleur; 1994:635). Tuntutan lain suatu pemberitaan yang ideal adalah memenuhi standar validitas atau kualitas keabsahan sebagai sebuah informasi. Kualitas keabsahan disini sebagaimana halnya dalam penelitian kualitatif dituntut adanya informasi otentik dari nara sumber yang kompeten (Nur Hidayat; 2000).

Sedang menurut McQuail, suatu pemberitaan yang objektif mempunyai syarat-syarat sebagaimana yang dia kemukakan dalam buku *Mass Communication Theory* bahwa:

"information should be objective in the sense of being accurate, honest, sufficiently complete, true to reality, reliable, and separating fact from opinion. Information should be balanced and fair (impartial) ---reporting alternative perspectives in a non-sensational, unbiased way" (McQuail; 1994:148).

Jadi menurut perspektif ini, informasi dikatakan objektif jika akurat, jujur, lengkap, sesuai dengan kenyataan, bisa diandalkan, dan memisahkan fakta dengan opini. Informasi juga harus seimbang dan adil, dalam artian melaporkan perspektif-perspektif alternatif dalam sifat yang tidak sensasional dan tidak bias.

Objektifitas, betapapun sulitnya, harus diupayakan oleh insan pers. Objektifitas berkait erat dengan kemandirian pers sebagai institusi sosial. Institusi pers memang dituntut objektif dan netral atas semua fakta. Hal itu penting mengingat signifikansi efek media terhadap khalayak, sebagaimana konsepsi Lippman di bagian muka.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini, pada dasarnya merupakan upaya menjawab permasalahan yang diajukan dengan cara pembuktian berdasarkan data-data empiris hasil penelitian. Adapun formulasi tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bagaimana akurasi pemberitaan surat kabar dalam *headline* berita politiknya.
2. Dapat diketahui bagaimana *fairness* pemberitaan surat kabar dalam *headline* yang memuat berita politik.
3. Mengetahui validitas *headline* yang diberitakan. Dengan mengetahui itu semua maka dapat diketahui pula objektivitas dari berita yang diteliti.

3.2. MANFAAT PENELITIAN

Idealnya setiap penelitian memiliki tiga manfaat atau signifikansi. Yaitu akademis atau praktis dan metodologis. Signifikansi akademis berkaitan dengan pembentukan, pengembangan, revisi atau kritik terhadap teori atau konsep-konsep baru. Signifikansi praktis berkaitan dengan manfaatnya dalam dunia praktis, yaitu apa rekomendasinya untuk para pelaku komunikasi. Terakhir signifikansi

metodologis yaitu yang menyangkut manfaat penelitian dalam mengembangkan atau menemukan metodologi baru.

Berdasarkan tipologi di atas, penelitian ini mempunyai dua signifikansi atau manfaat, yaitu praktis dan akademis. Dari manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat diketahui surat kabar mana yang dalam *headline* berita politiknya paling akurat, seimbang, dan valid. Dengan hasil itu, akan dapat diketahui media manasaja di Indonesia yang termasuk dalam kategori *the fairest and most accurate news paper in the political news* di Indonesia. Hasil inilah yang kemudian diberikan sebagai masukan bagi media-media yang diteliti untuk lebih meningkatkan kualitas pemberitaannya, sekaligus koreksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan.

Dengan kata lain, dengan diketahui kadar obyektivitas pemberitaan pers Indonesia, diharapkan semua media di tanah air bisa belajar untuk melakukan *self-control* melalui tata cara penulisan dan peliputan berita yang profesional dan dapat dipercaya oleh pembaca atau konsumen persnya. Sehingga cita-cita mewujudkan negara demokrasi dapat terwujud dengan bantuan pemberitaan pers dan peran media massa secara keseluruhan dalam kehidupan bernegara di tanah air ini. Selanjutnya secara praktis, kontribusi lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana profesionalisme pers Indonesia saat ini melalui pemberitaannya.

Sedangkan manfaat akademis adalah memberikan kontribusi tentang pengembangan konsep obyektivitas pemberitaan pers, bagaimana mengukurnya, dan apa kaitannya dengan konsep-konsep lain seperti, impartial, faktual dan fairness.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian obyektifitas media massa ini dilakukan secara kuantitatif. Yakni menyajikan data yang diolah ke dalam tabel-tabel frekuensi dengan cara melakukan penghitungan terhadap pemunculan kata-kata dan bahasa yang dipakai sebagai indikator terjadinya obyektifitas pers. Selain itu metode yang dipakai disini adalah teknik analisis isi yang memang melihat penggunaan kata-kata dan kalimat secara manifest atau yang tampak atau tertulis dalam surat kabar yang diteliti untuk setiap item beritanya. Sedangkan jenis atau tipe penelitian berdasarkan tataran analisisnya adalah penelitian deskriptif yakni hanya menggambarkan, mengoperasionalkan dan meneliti satu konsep saja, yaitu obyektifitas pemberitaan pers di Indonesia.

Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah surat kabar harian umum yang terbit di kota besar di pulau Jawa. Yang diteliti adalah harian besar yang memiliki tiras minimal 100.000 eksemplar dengan pertimbangan bahwa dengan tiras sebesar itu berarti media yang bersangkutan memiliki pembaca yang luas di masyarakat dan mempunyai potensi lebih mampu memunculkan opini publik yang cukup signifikan. Untuk itu, pers yang diteliti adalah meliputi *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Pikiran Rakyat*, *Jawa Pos*, *Suara Merdeka*, *Surya*, dan *Suara Pembaruan*. Mungkin diluar 8 media

o

tersebut, masih ada yang tirasnya lebih dari 100.000 eksemplar, namun karena berbagai pertimbangan dengan salah satunya yaitu proporsi isinya lebih mengarah ke berita kriminal. Maka media yang demikian itu tidak diikutsertakan untuk diteliti.

Sedangkan objek penelitian adalah berita politik dengan skala nasional yang menjadi berita utama (*headline*) media yang bersangkutan. Batasan ini berdasarkan pemikiran bahwa saat ini persoalan politik mendapat peliputan dan porsi yang lebih dibandingkan persoalan lainnya. Hal ini dikarenakan potensi adanya perubahan politik yang tak terduga yang memunculkan ketidakpastian politik (*political uncertainty*). Akibatnya, persoalan politik menjadi isu yang menarik untuk disimak. Begitu pula sesuai fungsi *agenda setting*, pemberitaan berbagai persoalan politik yang berlanjut itu juga memunculkan perhatian khalayak pembaca.

Operasionalisasi Konsep

Berita politik nasional adalah berita yang dimuat oleh surat kabar yang menyangkut esensi permasalahan politik dengan ruang lingkup atau cakupan nasional. Kriteria skala nasional ini dapat dilihat dari penempatannya di halaman pertama (menjadi *headline*) suatu surat kabar. Karena memang menjadi standar baku bahwa halaman pertama surat kabar memuat permasalahan yang paling menarik dan biasanya memiliki ruang lingkup atau cakupan skala nasional.

Sebagaimana sudah diuraikan di bagian tinjauan Pustaka, obyektivitas suatu pemberitaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu Akurasi pemberitaan, Fairness

yaitu menyangkut keseimbangan atau komitmennya pada azas imparialitas, dan keabsahan atau validitas. Masing-masing aspek untuk mengukur obyektivitas tersebut dapat dioperasionalkan dalam katagori-katagori berikut ini.

Katagorisasi

I. Untuk akurasi pemberitaan, yaitu menyangkut kejujuran dalam pemberitaan yang meliputi:

1. Kesesuaian judul berita dengan isi berita. Ini menyangkut aspek relevansi, yaitu apakah kalimat judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita, atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita. Selain itu dalam judul atau isi berita itu apakah terdapat penggunaan kata atau kalimat denotatif serta penggunaan tanda baca yang mengesankan makna ganda. Ketepatan mengacu pada judul utama *headline*, bukan sub judul. Dengan demikian, konsep ini dibagi dalam dua katagori:
 - a. Sesuai, yaitu apabila judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.
 - b. Tidak sesuai, yaitu apabila judul bukan merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita, atau bukan merupakan kutipan yang jelas-jelas ada.

2. Pencantuman waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini untuk melihat akurasi fakta atau opini. Yaitu apakah mencantumkan tanggal, atau adanya kata-kata yang menunjukkan waktu terjadinya peristiwa atau wawancara. Terdapat dua katagori dalam konsep ini, yaitu:
 - a. Dicantumkan waktu, yaitu apabila dalam tulisan itu mencantumkan waktu, baik yang berupa pencantuman tanggal, pencantuman kata-kata atau pernyataan tentang waktu atau keduanya, yaitu mencantumkan tanggal dan kata-kata.
 - b. Tidak dicantumkan waktu, yaitu jika dalam tulisan itu tidak mencantumkan baik tanggal ataupun kata-kata yang menunjukkan waktu.

3. Penggunaan data pendukung atau kelengkapan informasi atas kejadian yang ditampilkan. Kelengkapan data pendukung antara lain menggunakan: tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, dan lain-lain. Konsep ini dibagi dua, yaitu:
 - a. Ada data pendukung, yaitu apabila tulisan itu dilengkapi dengan salah satu data pendukung, seperti foto peristiwa, tabel, statistik (angka-angka), dan data referensi (buku, UU, Peraturan Pemerintah, dll).
 - b. Tidak ada data pendukung, jika tulisan itu sama sekali tidak dilengkapi dengan data pendukung seperti foto peristiwa, tabel, statistik (angka-angka), dan data referensi (buku, UU, Peraturan Pemerintah, dll).

4. Faktualitas berita, yaitu menyangkut ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita. Konsep ini dibagi dua, yaitu:
- Ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila dalam artikel berita itu terdapat kata-kata *opinionative*, seperti: tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata opinionatif lainnya.
 - Tidak mencampur fakta dan opini, yaitu jika dalam tulisan berita tersebut tidak terdapat kata-kata *opinionative* seperti pada poin 4.a. diatas.

II. Untuk *fairness* atau ketidakberpihakan dan imparialitas pemberitaan, yaitu yang menyangkut keseimbangan penulisan berita , dikatagorisasikan meliputi:

- Ketidakberpihakan, dilihat dari sumber berita yang digunakan, yaitu:
 - Seimbang, yaitu apabila masing-masing pihak yang diberitakan diberi porsi yang sama sebagai sumber berita, dilihat dari jumlah sumber beritanya.
 - Tidak seimbang, jika pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan berita itu tidak diberi porsi yang sama sebagai sumber berita, dilihat dari jumlah sumber beritanya.
- ketidakberpihakan dilihat dari ukuran fisik luas kolom (centimeter kolom) yang dipakai, yaitu:



- a. Seimbang, jika luas kolom yang dipakai antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan memiliki jumlah kesamaan.
- b. Tidak seimbang, jika luas kolom yang dipakai antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan tidak memiliki jumlah kesamaan.

III. Untuk mengetahui bagaimana validitas keabsahan pemberitaan, diukur dari:

1. Atribusi, yaitu pencantuman sumber berita secara jelas (baik identitas maupun dalam upaya konfirmasi atau cek dan re-cek). Konsep ini dibagi menjadi:
 - a. Sumber berita jelas, apabila dalam berita itu sumber berita yang dipakai dicantumkan identitasnya seperti nama, pekerjaan, atau sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi.
 - b. Sumber berita tidak jelas, apabila dalam berita itu tidak dicantumkan identitas sumber berita seperti nama, pekerjaan, atau sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi.
2. Kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita atau yang mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu kronologi peristiwa (berita yang menyangkut peristiwa dengan kronologi kejadiannya), apakah berasal dari apa yang dilihat wartawan sendiri atau dari sumber berita yang menguasai persoalan, atau hanya sekadar kedekatannya dengan media yang bersangkutan atau karena jabatannya. Katagori ini dibagi dalam:

- a. Wartawan, apabila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil pengamatan wartawan secara langsung, yaitu mengungkap informasi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh wartawan itu sendiri.
- b. Pelaku langsung, apabila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara dengan sumber berita yang mengalami langsung peristiwa tersebut (pelaku langsung interaksi sosial). Misalnya: saksi mata, saksi korban, atau orang yang memang terlibat langsung dengan peristiwa itu sendiri atau memang berada di lokasi ketika peristiwa itu terjadi.
- c. Bukan pelaku langsung, yaitu apabila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara dengan sumber berita yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Hanya karena jabatan atau memiliki akses informasi lalu menjadi sumber berita. Misalnya: petugas humas, juru bicara, kapuspen, atau juga para pejabat yang berwenang tetapi tidak berada di lokasi ketika peristiwa terjadi.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (katagorisasi) dapat dipercaya atau diandalkan bila dipakai lebih dari satu kali untuk mengukur gejala yang sama. Katagorisasi dalam penelitian ini belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Maka perlu dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi katagorisasi.

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi terlebih dahulu pada saat pengumpulan data dan kemudian memasukkannya ke dalam lembar koding sesuai dengan katagorisasi yang telah ditentukan. Kemudian seorang hakim yang telah dipilih akan melakukan uji reliabilitas terhadap katagorisasi tersebut dengan cara yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian dari kedua hasil uji reliabilitas tersebut akan diketahui berapa yang disetujui bersama oleh peneliti dan hakim. Perhitungan *reliable* tidak-nya katagorisasi akan dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh R. Holsty (Wimmer & Dominick; 1997:128), yaitu:

$$C.R. = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

C.R. = *Coefficient Reliability*

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode
(peneliti dan hakim)

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan
peneliti

Dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan *observed agreement* (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Penyempurnaan untuk memperkuat hasil reliabilitas, maka digunakan rumus Scott:

$$pi = \frac{\% Observed Agreement - \% Expected Agreement}{1 - \% Expected Agreement}$$

Keterangan:

<i>pi</i>	= nilai keterhandalan
<i>Observed Agreement</i>	= jumlah pernyataan yang disetujui oleh antarpengkode, yaitu nilai C.R.
<i>Expected Agreement</i>	= persetujuan yang diharapkan atas banyaknya tema dalam suatu katagorisasi yang sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari proporsi seluruh tema

Meski belum ada standar reliabilitas yang mutlak namun menurut Wimmer & Dominick, ambang penerimaan yang sering digunakan adalah 0,75 untuk yang menggunakan *pi*. Jika kesesuaian anatar penyusun kode tidak mencapai 0,75 maka katagorisasi operasional mungkin perlu dibuat lebih spesifik lagi.

Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah item berita, yaitu berita politik yang menjadi *headline* surat kabar yang diteliti. Sedangkan yang akan dikuantifikasi adalah kata-kata dan kalimat yang terdapat di dalam item pemberitaan yang diteliti dalam setiap surat kabar yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh berita politik yang dimuat di *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Surya*, *Jawa Pos*, *Pikiran Rakyat*, *Suara Merdeka*, dan *Suara Pembaruan* dari bulan January -April 2000 Pemilihan jangka waktu ini berdasarkan pertimbangan kondisi politik nasional yang berpolemik dan memanas.

Selama masa penerbitan tersebut, diambil sampel sebanyak 100 item berita dengan cara *random* sederhana. Sedangkan jumlah 100 item berita berdasarkan perhitungan keterwakilan. Dengan mengambil 100 dari keseluruhan *headline* berita, berarti sampel telah mencapai 57% yang berarti amat representatif. Sedangkan untuk menentukan item berita mana yang dipilih, menggunakan *simple random sampling*. Karena yang diteliti ada 8 penerbitan, maka jumlah total sampel yang diteliti sebanyak 800 item berita.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan mendokumentasikan terlebih dahulu semua berita politik nasional yang menjadi *headline* di surat kabar *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Surya*, *Jawa Pos*, *Suara Pembaruan*, *Suara Merdeka*, dan *Pikiran Rakyat*. Kemudian digunakan lembar koding untuk memasukkan data-data yang telah dikumpulkan sesuai berdasarkan katagori yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah terkumpul data dalam bentuk koding, berikutnya dilakukan proses perhitungan dan analisis.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpulkan akan diuraikan dengan menggunakan lembar koding. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang dalam tabel. Dari tabulasi tersebut, akan dilakukan analisis dan perhitungan persentase mengenai akurasi, *fairness*, dan validitas berita yang diungkapkan dalam berita utama politik nasional di harian *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Surya*, *Jawa Pos*, *Suara Pembaruan*, *Suara Merdeka*, *Pikiran Rakyat*..

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan perhitungan selama waktu kurun penelitian, yaitu sejak bulan Juli hingga bulan November 1999, tim peneliti telah memperoleh berbagai temuan data sekaligus analisisnya. Temuan dan analisis data kami bagi dalam beberapa aspek sesuai katagorisasi yang telah ditetapkan pada saat operasionalisasi konsep di bagian muka. Pemberian data pada bagian temuan dan analisis ini kami deskripsikan dalam bentuk tabel-tabel silang. Penggunaan tabel-tabel ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis data sekaligus melakukan interpretasi dengan membaca angka-angka yang ditampilkan, sekaligus memberi makna terhadap data-data yang diperikan tersebut.

5.1. Tema Utama/ *Headlines*

Temuan data yang pertama adalah menyangkut tema utama/ *headlines* dari masing-masing surat kabar yang diteliti selama periode penelitian. Pada Tabel 1 diperlihatkan beberapa tema utama, persoalan, atau topik berita yang diungkap di dalam *headline* surat kabar yang bersangkutan. Dilihat dari keragaman tema berita harian Kompas ada pada posisi pertama sebagai surat kabar yang topiknya paling beragam.

Tabel 1. Tema Utama/ *Headlines* (n = 75)

Issue Utama	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Pencalonan Presiden	32,3	42,7	8	34,7	32,4	12	24,5	31,1
Pemilu	14,6	5,3	21,3	28	2,6	28	-	53,8
Andi Ghalib	5,3	6,7	1,3	1,3	-	12	-	2,5
Kasus Soeharto	5,3	14,7	6,6	2,7	2,6	18,7	1,9	7,6
Badan legislatif	-	1,3	2,6	1,3	1,3	1,3	-	2,5
Poros tengah	-	-	-	-	1,3	-	-	2,5
Hutang luar negeri	-	-	2,6	-	-	2,7	-	-
Program JPS	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-
Peringatan Trisakti	-	1,3	1,3	-	-	1,3	-	-
Timtim	13,3	6,7	18,6	12	17,3	2,7	37,7	-
Kasus Bank Bali	5,3	8	12,5	2,7	22,6	-	13,2	-
Intern Golkar	2,6	-	1,3	-	-	-	-	-
Isu Kudeta Habibie	-	2,7	1,3	-	-	-	-	-
RUU PKB	-	-	1,3	4	4	-	7,5	-
SU MPR	13,3	6,7	20	14,7	13,3	5,3	15,1	-
Aceh	4	2,7	-	-	1,3	5,3	-	-
Korupsi Pertamina	-	-	-	-	-	9,3	-	-
Pers bebas	-	-	-	-	-	1,3	-	-
Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-	1,3	-	-	-
Kabinet Gus Dur	4	-	-	-	1,3	-	-	-
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Dari 75 *headlines* berita, Harian Kompas memuat 14 macam topik pemberitaan, dari Pencalonan Presiden, Pemilu, Kasus Andi Ghalib, Kasus Soeharto, Persoalan DPR atau legislatif, hutang luar negeri, Program JPS, Peringatan Trisakti, Tim-tim, Kasus Bank Bali, Masalah Golkar, Rumor Kudeta Habibie, RUU PKB, dan SU MPR. Sementara surat-kabar lain yang cukup beragam temanya adalah Harian Surya, Suara Merdeka, dan Suara Pembaruan.

5.2. Akurasi Pemberitaan

Akurasi berita dalam penelitian ini dilihat dari beberapa indikator, yaitu kesuaian judul dengan isi beritanya, pencantuman waktu peristiwanya atau wawancaranya, penggunaan data pendukung, *impartially* atau menyangkut ada pencampuran fakta dengan opini ataukah tidak, dan frekuensi terjadinya salah cetak. Untuk indikator pertama, kesesuaian judul dengan isi berita, secara operasional dikatakan ada kesesuaian bila judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

Sedangkan dikatakan tidak sesuai jika judul bukan merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita, atau bukan yang jelas-jelas ada pada isi beritanya. Adapun temuan dan analisis data untuk kesuaian judul dengan isi ini secara kuantitatif persentase yang tertinggi adanya judul yang tidak sesuai dengan isi ada pada harian Pikiran Rakyat 25,6%. Kemudian berturut-turut ialah Media Indonesia 11,3%, dan Harian Surya 8%, Kompas dan Republika masing-masing 6,7%, serta

Suara Merdeka dan Suara Pembaruan masing-masing sebesar 4% item beritanya yang tidak sesuai antara isi berita dengan judul berita. Sementara persentase terendah ketidak sesuaian ada pada Harian Jawa Pos yaitu sebesar 1,3%. Untuk indikator yang pertama ini Jawa Pos sementara memperoleh persentase terbaik di banding surat kabar lainnya dimana dari 75 item berita yang diteliti hanya terdapat 1 buah item berita yang isinya tidak sesuai dengan judul berita (*headline*). Tabel mengenai kesesuaian judul dengan isi berita tersebut terdapat pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Kesesuaian Judul dengan Isi Berita (n = 75)

Kesesuaian Judul dengan Isi berita	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Sesuai	98,7	92	93,3	93,3	96	96	88,7	74,4
Tidak Sesuai	1,3	8	6,7	6,7	4	4	11,3	25,6
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Aspek akurasi pemberitaan selain kesesuaian judul dengan isi, terdapat unsur lain yang tak kalah pentingnya untuk memberikan kelengkapan terhadap pemberitaan yang dimuat, unsur kelengkapan ini menjadi salah satu syarat munculnya akurasi. Pemberitaan yang parsial, tidak lengkap secara teoretik akan terjauh pula dari keakurasian, karena pembaca akan kesulitan dalam mempersepsi

data yang tidak lengkap. Untuk itu aspek keakurasian berita juga akan dilihat dari pencantuman waktu peristiwa yang diberitakan. Berikut ini data dan tabelnya.

Tabel 2.2. Pencantuman Waktu Peristiwa (n = 75)

Pencantuman Waktu Peristiwa	JP	Surya	Kompa	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Tanggal	-	17,3	1,3	-	-	100	-	-
Kata-kata	93,3	5,3	2,7	96	86,7	-	88,7	30,8
Tanggal dan Kata-kata	1,3	73,3	94,7	4	4	-	1,9	69,2
Tidak Ada	5,3	4	1,3	-	9,3	-	9,4	-
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Pada tabel di atas juga telah dijelaskan dalam Tabel 2.2. tentang pencantuman waktu peristiwa. Kriteria terbaik pencantuman waktu adalah apabila media yang bersangkutan memuat baik tanggal maupun kata-kata, artinya komplit keduanya dicantumkan. Kalaupun tidak demikian paling tidak, salah satu dari tanggal atau kata-kata haruslah ada. Untuk data ini nampaknya Harian Kompas merupakan media yang paling banyak memuat tanggal dan kata-kata secara komplit, yaitu sebesar 94,7%, sementara Harian Surya hanya 73,3%. Suara Pembaharuan menggunakan *style* yang berbeda, surat kabar ini 100% hanya mencantumkan tanggal di bagian atas, tanpa ada kata-kata. Sementara Republika hanya sebesar 96%

pencantuman waktu diwujudkan dalam bentuk kata-kata, dan hal demikian diikuti pula oleh Jawa Pos 93,3%. Sedangkan persentase yang paling banyak tidak mencantumkan waktu adalah Harian Media Indonesia yaitu sebesar 9,4% dan kemudian disusul Suara Merdeka 9,3%. Persoalannya, pencantuman waktu yang baik bagi sebuah berita itu harus bagaimana? Dalam konsepsi 5 W + 1 H, yang dipentingkan bagi suatu berita hanyalah adanya unsur-unsur *Who, What, When, Why, and How*. Untuk unsur *When* tidaklah disyaratkan harus bagaimana bentuknya. Artinya bisa tanggal ataupun juga dengan kata-kata atau keduanya. Hanya saja kalau pencantuman waktu itu mencantumkan keduanya akan lebih baik, karena akan lebih mengingatkan pembaca tentang kapan terjadinya peristiwa tadi.

Yang agak tidak jelas adalah jika berita itu hanya memuat pencantuman waktu berupa kata-kata saja, ada kemungkinan ketidakjelasan untuk bentuk penulisan seperti ini. Menurut data, penggunaan kata-kata saja sering mengaburkan ketepatan waktu, sebab ada ketidakjelasan atau kalau seseorang ingin mengetahui secara lebih tepat perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah penggunaan kata "kemarin", "hari yang lalu", dan sebagainya. Untuk keakurasian waktu agak meragukan atau minimal perlu konfirmasi dan pengecekan ulang. Oleh karena itu semakin lengkap pencantuman waktunya semakin baik cara penulisan berita tersebut.

Selanjutnya dalam jurnalisme obyektif ada suatu persyaratan bahwa, berita yang baik adalah berita yang didukung oleh data empiris, data hasil penelitian atau data resmi. Karena itu penggunaan data pendukung untuk memperkuat suatu

pemberitaan, merupakan tuntutan untuk presisi jurnalisme. Data pendukung ini bisa berasal dari hasil penelitian media itu sendiri, penelitian lembaga atau orang lain, data milik instansi tertentu, dan lain-lain. Yang penting, untuk memperkuat kebenaran dari realitas yang ditampilkan. Data itu sendiri bisa berupa tabel, angka-angka statistik, juga foto-foto, dan bentuk data yang lain. Adapun temuan dan analisis untuk penggunaan data pendukung dapat disimak pada Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3. Penggunaan Data Pendukung (n = 75)

Penggunaan Data Pendukung	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Ada	61,3	48	76	41,3	45,3	76	84,9	48,7
Tidak	38,7	52	24	58,7	54,7	24	15,1	51,3
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Pada Tabel 2.3. yang menampilkan penggunaan data pendukung, persentase terbesar yang menggunakan data pendukung dalam pemberitaan *headlines* selama periode penelitian adalah Harian Media Indonesia, yaitu hingga 84,9%. Disusul Kompas dan Suara Pembaharuan, masing-masing 76% pemberitaannya dilengkapi data pendukung. Berikutnya Jawa Pos mencapai 61,3%. Yang persentasenya paling kecil menggunakan data pendukung adalah Harian Republika yaitu sebesar 41,3% dan Harian Surya sebesar 48%, kemudian Pikiran Rakyat sebesar 48,7%. Tentu saja

untuk konsepsi semakin besar persentase adanya data pendukung, semakin baik pemberitaan tersebut, karena hal itu sesuai dengan tuntutan obyektivitas berita.

Keakuratan berita, atau juga sering disebut presisi sebuah berita, tidak hanya disyaratkan dengan adanya data pendukung, namun juga menuntut adanya keakuratan dalam memotret atau mendiskripsikan realitas. Keakuratan mendeskripsikan realitas, biasanya diukur dari sejauh mana sebuah berita secara tegas memisahkan antara fakta dengan opini atau persepsi wartawan. Untuk mengoperasionalkan kapan suatu berita itu mencampurkan antara fakta dan opini, dalam penelitian kuantitatif dilihat dari adanya *keywords* yang berupa kata-kata *opinionative* yang ada dalam berita itu.

Kata kunci yang mengandung opini adalah kata-kata seperti; *tampaknya, kayaknya, terkesan, kesannya, terlihat, seolah, agaknya, sayangnya, seakan-akan, diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver*, dan kata-kata *opinionative* lain yang memperlihatkan adanya pendapat atau juga persepsi wartawan yang dimasukkan untuk menilai suatu realitas. Sedangkan untuk berita yang tidak mencampurkan fakta dan opini berarti tentu saja, di dalam pemberitaannya tidak terdapat kata-kata *opinionative* tersebut. Adapun bagaimana temuan datanya, berikut ini tabel 2.4. sebagai analisis untuk konsepsi pencampuradukan fakta dengan opini:

Tabel 2.4. Pencampuran Fakta dengan Opini (n = 75)

Pencampuran Fakta dengan Opini	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Ada	81,3	88	20	20	38,7	1,3	18,9	43,6
Tidak Ada	18,7	12	80	80	61,3	98,7	81,1	56,4
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Dari Tabel 2.4 diatas, yang persentasenya terbanyak mencampurkan fakta dan opini adalah pemberitaan *headlines* di harian Surya sebesar 88% yang kemudian disusul Jawa Pos (81,3%), kemudian Pikiran Rakyat (43,6%). Sedangkan yang paling sedikit mencampurkan fakta dan opini adalah Suara pembaruan (1,3%), kemudian Media Indonesia (18,9%). Kompas dan Republika masing-masing sebesar 20%. Semakin sedikit persentase adanya pencampuran fakta dan opini, maka semakin baik pemberitaan media yang bersangkutan. Berita yang mencampurkan fakta dan opini, berarti wartawan yang bersangkutan ikut "bermain" untuk mempengaruhi opini dari pembacanya, inilah mengapa media yang banyak pemberitaannya mencampurkan fakta dan opini amatlah dirahgukan obyektivitas dalam pemberitaannya.

Keakuratan dalam pemberitaan juga dapat diindikasikan dari banyaknya salah cetak atau salah tulis atau salah kutip pada waktu pemberitaan itu dimuat seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.5. Kesalahan Cetak dan Penulisan Istilah (n = 75)

Kesalahan Cetak dan Penulisan Istilah	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Ada	32	16	2,7	16	10,7	2,7	-	20,5
Tidak Ada	68	84	97,3	84	89,3	97,3	100	79,5
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaharuan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Berdasarkan Tabel 2.5. diatas, media yang paling sedikit melakukan salah cetak atau salah tulis adalah Media Indonesia (0%), kemudian Suara Pembaharuan dan Kompas, yang masing-masing sama (2,7%) untuk kedua harian tersebut selama penelitian ini dilangsungkan. Sedangkan harian yang paling banyak melakukan kesalahan cetak ataupun kutip adalah Harian Jawa Pos (32%), kemudian Pikiran Rakyat sebesar 20,5%, dan berikutnya Harian Surya (16%) dari total berita *headlines* yang diteliti. Angka ini tentu saja menunjukkan kelebihan dari tiga harian yaitu Media Indonesia, Kompas, dan Suara Pembaharuan.

5.3. Ketidakberpihakan Media (*Fairness*)

Ketidakberpihakan atau *fairness* merupakan salah satu aspek pemberitaan yang obyektif. Dalam teori jurnalistik memang pemberitaan yang obyektif disyaratkan bersifat *impartial*, yaitu mengandung minimal dua perspektif atau sudut pandang dalam melihat suatu realitas. Selanjutnya dua perspektif atau sudut pandang itu bisa dilihat aspek keseimbangannya, apakah *balance* ataukah tidak. Dalam penelitian ini keseimbangan dalam pemberitaan tersebut dilihat dari dua sisi yaitu dari jumlah atau banyaknya sumber berita yang digunakan dan yang kedua dari ukuran fisik luas kolom yang diberikan untuk masing-masing persepektif dalam pemuatan berita.

Tabel 3.1. Keseimbangan Penulisan Berita Berdasarkan Sumber Berita yang Diberitakan (n = 75)

Keseimbangan Berdasarkan Sumber Berita	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Seimbang	60	34,7	38,7	52	44	45,3	62,3	51,3
Tidak Seimbang	40	65,3	61,3	48	56	54,7	37,7	48,7
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Pada Tabel 3.1. diatas mengenai keseimbangan penulisan berita berdasarkan sumber berita yang diberitakan dan selanjutnya pada Tabel 3.2. akan dijelaskan

mengenai keseimbangan penulisan berita berdasarkan luas kolom yang dipakai. Tentang seimbang tidaknya berita pada Tabel 3.1., dilihat dari jumlah sumber berita yang digunakan masing-masing perspektif.

Pertama-tama, untuk mengukur suatu berita dikatakan seimbang dalam menggunakan sumber berita adalah dilihat dari jumlah sumber berita yang secara nyata nampak (ditulis) dalam pemberitaan yang diteliti. Dikatakan seimbang jika jumlah masing-masing pihak atau perspektif pemberitaan itu diberi porsi yang sama. Dan dikatakan tidak seimbang jika jumlahnya berbeda untuk masing-masing perspektif. Daya yang ada untuk konsep ini nampak pada tabel 3.1 di atas. Persentase berita yang paling banyak seimbang adalah Media Indonesia (62,3%), kemudian Jawa Pos (60%), dan Republika (51,3%).

Untuk ukuran ini, yang paling buruk adalah Harian Surya (34,7%) kemudian disusul Kompas (38,7%) dan Suara Merdeka (44%). Namun perlu diingat ukuran ini adalah ukuran yang murni kuantitatif yang hanya dilihat dari jumlah nara sumber yang dipakai. Untuk itu agar lebih lengkap, berikut ini kami kemukakan pula angka-angka keseimbangan berdasarkan ukuran fisik luas kolom yang digunakan untuk masing-masing perspektif pada Tabel 3.2. seperti berikut.

Tabel 3.2. Keseimbangan Penulisan Berita Berdasarkan Luas Kolom yang Dipakai (n = 75)

Keseimbangan Berdasarkan Luas Kolom	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Seimbang	45,3	10,7	28	48	29,3	42,7	54,7	41
Tidak Seimbang	54,7	89,3	72	52	70,7	57,3	45,3	59
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Data diatas juga merupakan data kuantitatif murni, yang pengukurannya dikatakan seimbang jika luas kolom yang dipakai antara pihak-pihak yang terlibat memiliki jumlah kesamaan. Dan dikatakan tidak seimbang jika jumlah luas kolomnya tidaklah sama. Menurut Tabel 3.2 di atas, nampak bahwa persentase seimbang tertinggi adalah Harian Media Indonesia (54,7%), kemudian Republika (48%), dan baru kemudian Jawa Pos (45,3%), disusul Suara Pembaharuan (42,7%). Yang paling tidak seimbang ada pada pemberitaan Surya (10,7%), Kompas (28%), dan Suara Merdeka (29,3%).

Untuk persoalan keseimbangan ini peneliti memang mendasarkan pada aspek kuantitatif murni, yang kemungkinan mempunyai perbedaan jika dianalisis berdasarkan kualitatif, yang melihat ketajaman kalimat, kata, diksi, dan lain-lain. Terlebih lagi aspek keseimbangan dalam beberapa konteks tertentu, ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa konsepsi *balance* ini dalam konteks tertentu

dapat “diabaikan” apabila pemberitaan yang bersangkutan sudah didukung oleh data yang valid, atau menggunakan jurnalisme presisi yang didukung data akurat dan berani diuji atau dipertanggungjawabkan. Serta pemberitaan itu sendiri bertujuan untuk suatu koreksi atau kontrol sosial sesuai dengan misi pers sebagai kekuatan kontrol.

5.4. Validitas atau Keabsahan Berita

Dalam pembahasan pada bagian ini, pertama-tama yang dikemukakan hanyalah menyangkut permasalahan pilihan sumber berita yang paling banyak dipakai. Tujuan untuk menampilkan data ini untuk memperlihatkan variasi narasumber yang dipakai dalam pemberitaan di *headlines*. Asumsinya semakin beragam nara sumber yang dipakai tentulah semakin baik. Untuk itu berikut ini kami tampilkan dalam tabel-tabel berikutnya.

Dilihat dari aspek pemerataan nara sumber pada Tabel 4.1., Harian Surya merupakan koran yang paling beragam nara sumbernya, yaitu dari *elite* pemerintahan hingga mahasiswa dan rakyat biasa. Disusul Republika, kemudian Kompas, Suara Merdeka, Suara Pembaharuan, dan Media Indonesia. Yang paling kontroversi adalah Jawa Pos. Harian ini tidak pernah dalam *headline* yang teliti memberikan porsi nara sumber pada mahasiswa dan rakyat biasa. Tapi koran ini banyak memberi kesempatan pada para akademisi sebagai nara sumber yang persentasenya jauh melebihi porsi yang sama yang diberikan pada akademisi oleh harian lain..

Tabel 4.1. Pilihan Sumber Berita Dalam Analisis/Komentar (n = 75)

Sumber Berita	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Pemerintah	9,8	14,5	13	15,9	10,1	32,2	13,6	15,9
Militer/Purn.	4,3	7,2	3,5	6,5	6,5	4	22	7,2
Akademisi	40,1	10,5	9,5	16,8	9,5	21,5	5,1	15,9
Praktisi	3,2	9,1	10,1	3,7	6	9,4	15,3	5,7
DPR/MPR	8,7	12,3	31,5	15	24,6	6	10,2	2,8
Politikus	24,1	34,4	17,2	25	29,2	18,1	11,9	39,1
Rakyat Biasa	-	0,7	0,5	0,9	2	1,3	1,7	-
Mahasiswa	-	0,7	-	0,9	-	-	-	1,4
Lain-lain	9,8	10,5	14,7	15	12,2	7,5	20,3	12
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Yang lebih penting mengenai nara sumber yang dipakai dalam pemberitaan adalah menyangkut ada tidaknya identitas nara sumber yang dipakai, atau jelas tidaknya identitas nara sumber sumber yang bersangkutan, sehingga jika diperlukan konfirmasi bisa dilakukan. Pada Tabel 4.2. berikut bisa digambarkan keberadaan identitas nara sumber yang dipakai dalam berita-berita yang merupakan analisis atau komentar.

Tabel 4.2. Identitas Sumber Berita Dalam Analisis/Komentar

(n = 75)

Identitas Sumber Berita	J P	Surya	Kompas	Rep	SM	S P	MI	P R
	%	%	%	%	%	%	%	%
Ada	100	97,5	94	100	94,4	100	96,6	100
Tidak Ada	-	2,5	6	-	5,6	-	3,4	-
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Untuk pemberitaan yang berupa ulasan atau komentar terhadap peristiwa, sebagian besar harian memuat identitas nara sumbernya. Suara Pembaruan, Jawa Pos, Republika, dan Pikiran Rakyat secara mutlak (100%) semua nara sumber yang berkomentar dalam pemberitaan mereka diberi informasi tentang identitasnya. Sedangkan Kompas ada 6% yang tidak dicantumkan nara sumbernya. Sedangkan Suara Merdeka ada 5,6% tanpa identitas nara sumber, kemudian Surya sebesar 2,5% tanpa identitas nara sumber.

Tabel 4.3. Luas Pemberitaan Dalam Analisis/Komentar (n = 75)

Sumber Berita	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Pemerintah	18,9	18,8	14,5	19,9	9,1	34,2	14,8	25,8
Militer/Purnawirawan	2,5	6,4	7	5,9	6,1	4,4	20,4	7,8
Akademisi	35,7	21,6	19,4	17,6	14,7	23,09	4,9	18,8
Praktisi	3,5	7,5	6,4	2	3,7	8,4	7,9	2,3
DPR/MPR	9,6	5,2	13,2	12,4	19,9	4,1	44	2,6
Politikus	20,3	35,1	25,3	28	33,7	18	3,7	35,1
Rakyat Biasa	-	1,1	0,1	0,2	0,7	0,2	0,1	-
Mahasiswa	-	0,2	-	0,2	-	-	-	3,7
Lain-lain	9,5	4	15,1	13,8	12,1	6,8	4,3	3,5
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Tabel 4.3 diatas menampilkan data tentang porsi yang dipakai masing-masing nara sumber dalam berkomentar pada pemberitaan. Ada yang porsi paling banyak diberikan pada komentarnya para politisi seperti pada harian Surya (35,1%), Pikiran Rakyat (35,1%), Suara Merdeka (33,7%), Republika (28%), dan Kompas (25,3%). Sedangkan untuk Jawa Pos, porsi terbesar nara sumber komentar diberikan pada akademisi (35,7%). Sedangkan Suara Pembaruan persentase terbesar pada *elite* pemerintah (35,2%).

Tabel 4.4. Kompetensi Sumber Berita (n = 75)

Kompetensi Sumber Berita	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Wartawan	26,6	45,1	32,4	23,6	25	34,8	41,1	57,1
Pelaku Langsung	44,9	28,4	57,3	70,8	72,1	56,5	41,1	40,8
Bukan pelaku Langsung	28,5	26,5	10,3	5,6	2,9	8,7	17,8	2,1
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Sedangkan pada Tabel 4.4. diatas, kompetensi sumber berita digunakan untuk melihat siapa sumber berita yang melakukan deskripsi terhadap suatu realitas atau peristiwa yang terjadi. Disini ada tiga opsi, yaitu ada realitas yang dideskripsikan oleh wartawan sendiri, ada yang berasal dari informasi pelaku langsung yaitu orang yang mengalami langsung peristiwa yang diberitakan atau saksi mata, saksi korban, atau orang yang terlibat langsung dengan peristiwa itu sendiri atau berada di lokasi ketika kejadian berlangsung. Pelaku langsung jelas lebih kompeten dibanding dengan bukan pelaku langsung, yang hanya karena jabatan atau pemilikan akses informasi lalu menjadi sumber berita.

Pada Tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa yang paling banyak menggunakan nara sumber bukan pelaku langsung adalah Jawa Pos (28,5%), kemudian Harian Surya (26,5%), dan Media Indonesia (17,8%). Sedang yang paling sedikit adalah Pikiran rakyat (2,1%), Suara Merdeka (2,9%), Republika (5,6%), Suara

Pembaruan (8,7%), kemudian Kompas (10,3%). Tentu saja media atau harian yang banyak menggunakan nara sumber bukan para pelaku langsung berarti media tersebut tidaklah bersedia "bersusah-susah" dalam mencari informasi. Mereka juga boleh dikatakan kurang "independen" dalam hal memotret realitas, karena lebih menggantungkan pada nara sumber formal, yang berdasarkan jabatan atau akses pada informasi.

Selanjutnya pada halaman berikutnya akan dijelaskan mengenai identitas nara sumber yang digambarkan pada Tabel 4.5. serta luas pemberitaan kompetensi sumber berita pada Tabel 4.6.

Tabel 4.5 Identitas Nara Sumber (n = 75)

Identitas Nara Sumber	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Ada	96	98	96,1	93,1	87	87	95,3	85,7
Tidak Ada	4	2	3,9	6,9	13	13	4,7	14,3
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Dari para nara sumber yang bukan wartawan seperti yang digambarkan pada Tabel 4.5., menunjukkan ada tidaknya kelengkapan identitas mereka. Sebagian besar pemberitaan di berbagai harian tersebut sudah menunjukkan identitas mereka. Hanya saja menurut tabel di atas, persentase terbesar ada pada Harian Surya (98%), Kompas (96,1%), kemudian Jawa Pos (96%), dan kemudian Media Indonesia (95,3%).

Sedangkan yang terbesar tidak ada identitasnya adalah Pikiran Rakyat (14,3%), kemudian Suara Merdeka sebesar 13%, serta Republika sebesar 6,9%.

Tabel 4.6. Luas Pemberitaan Kompetensi Sumber Berita (n = 75)

Sumber Berita	JP	Surya	Kompas	Rep	SM	SP	MI	PR
	%	%	%	%	%	%	%	%
Wartawan	44,8	54,4	53,3	32,8	62,5	40,9	69,5	41,4
Pelaku Langsung	37,7	21,8	43,4	63,5	35,2	50,9	19,8	58,3
Bukan pelaku Langsung	17,5	23,8	3,3	3,7	2,3	8,2	10,7	0,3
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: JP = Jawa Pos; Rep = Republika; SM = Suara Merdeka; SP = Suara Pembaruan; SM = Suara Merdeka; MI = Media Indonesia; PR = Pikiran Rakyat

Selanjutnya pada Tabel 4.6., merupakan kelengkapan Tabel 4.4, yaitu jika pada Tabel 4.4. hanya dilihat dari jumlah personal nara sumbernya, maka pada Tabel 4.6. dilihat dari luas kolom yang digunakan untuk masing-masing nara sumber. Kalau dilihat dari sisi luas kolom yang paling sedikit menggunakan pelaku tidak langsung adalah Pikiran Rakyat yaitu sebesar 0,3%, kemudian Suara Merdeka sebesar 2,3%, dan yang ketiga ialah Kompas dengan persentase sebesar 3,3%. Sementara yang terbanyak menggunakan sumber pelaku tidak langsung adalah Surya (23,8%), Jawa Pos (17,5%) dan Media Indonesia (10,7%).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang telah dipaparkan panjang lebar pada bab sebelumnya maka beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari keragaman tema berita harian *Kompas* ada pada posisi pertama sebagai surat kabar yang topiknya paling beragam. Dari 75 *headlines* berita, Harian *Kompas* memuat 14 macam topik pemberitaan, dari Pencalonan Presiden, Pemilu, Kasus Andi Ghalib, Kasus Soeharto, Persoalan DPR atau legislatif, hutang luar negeri, Program JPS, Peringatan Trisakti, Tim-tim, Kasus Bank Bali, Masalah Golkar, Rumor Kudeta Habibie, RUU PKB, dan SU MPR. Sementara surat-kabar lain yang cukup beragam temanya adalah Harian *Surya*, *Suara Merdeka*, dan *Suara Pembaruan*.
2. Adapun untuk kesuaian judul dengan isi ini yang tertinggi adanya judul yang tidak sesuai dengan isi ada pada harian *Pikiran Rakyat* 25,6%. Kemudian berturut-turut ialah *Media Indonesia* 11,3%, dan *Harian Surya* 8%, *Kompas* dan *Republika* masing-masing 6,7%, serta *Suara Merdeka* dan *Suara Pembaruan* masing-masing sebesar 4% item berita. Sementara persentase terendah ketidak

sesuaian ada pada *Harian Jawa Pos* yaitu sebesar 1,3%. Untuk indikator ini *Jawa Pos* sementara memperoleh persentase terbaik di banding surat kabar lainnya dimana dari 75 item berita yang diteliti hanya terdapat 1 buah item berita yang isinya tidak sesuai dengan judul berita (*headline*).

3. Tentang pencantuman waktu peristiwa, kriteria terbaik adalah apabila media yang bersangkutan memuat tanggal maupun kata-kata. Kalaupun tidak, salah satu dari tanggal atau kata-kata haruslah ada. *Harian Kompas* merupakan media yang paling banyak memuat tanggal dan kata-kata secara komplit, yaitu sebesar 94,7%, sementara *Harian Surya* hanya 73,3%. *Suara Pembaharuan* menggunakan *style* yang berbeda, surat kabar ini 100% hanya mencatumkan tanggal di bagian atas, tanpa ada kata-kata. Sementara *Republika* hanya sebesar 96% pencantuman waktu diwujudkan dalam bentuk kata-kata, dan hal demikian diikuti pula oleh *Jawa Pos* 93,3%. Yang paling banyak tidak mencantumkan waktu adalah *Harian Media Indonesia* sebesar 9,4%, kemudian *Suara Merdeka* 9,3%. Penggunaan kata-kata saja sering mengaburkan ketepatan waktu, sebab ada ketidakjelasan atau kalau seseorang ingin mengetahui secara lebih tepat perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah penggunaan kata "kemarin", "hari yang lalu", dan sebagainya. Oleh karena itu semakin lengkap pencantuman waktunya semakin baik cara penulisan berita tersebut.
4. Persentase terbesar yang menggunakan data pendukung dalam pemberitaan *headlines* selama periode penelitian adalah *Harian Media Indonesia*, hingga

84,9%. Disusul *Kompas* dan *Suara Pembaharuan*, masing-masing 76% pemberitaannya dilengkapi data pendukung. *Jawa Pos* mencapai 61,3%. Yang persentasenya paling kecil menggunakan data pendukung adalah *Harian Republika* yaitu sebesar 41,3% dan *Harian Surya* sebesar 48%, kemudian *Pikiran Rakyat* sebesar 48,7%. Tentu saja semakin besar persentase adanya data pendukung, semakin baik pemberitaan tersebut.

5. Surat kabar yang terbanyak mencampurkan fakta dan opini adalah pemberitaan *headlines* di *harian Surya* sebesar 88% yang kemudian disusul *Jawa Pos* (81,3%), kemudian *Pikiran Rakyat* (43,6%). Sedangkan yang paling sedikit mencampurkan fakta dan opini adalah *Suara pembaruan* (1,3%), kemudian *Media Indonesia* (18,9%). *Kompas* dan *Republika* masing-masing sebesar 20%. Semakin sedikit persentase adanya pencampuran fakta dan opini, maka semakin baik pemberitaan media yang bersangkutan. Media yang banyak pemberitaannya mencampurkan fakta dan opini amatlah diragukan obyektivitas dalam pemberitaannya.
6. Media yang paling sedikit melakukan salah cetak atau salah tulis adalah *Media Indonesia* (0%), kemudian *Suara Pembaharuan* dan *Kompas*, yang masing-masing sama (2,7%) untuk kedua harian tersebut selama penelitian ini dilaksanakan. Sedangkan harian yang paling banyak melakukan kesalahan cetak ataupun kutip adalah *Harian Jawa Pos* (32%), kemudian *Pikiran Rakyat* sebesar 20,5%, dan berikutnya *Harian Surya* (16%) dari total berita *headlines*

yang diteliti. Angka ini tentu saja menunjukkan kelebihan dari tiga harian yaitu *Media Indonesia*, *Kompas*, dan *Suara Pembaharuan*.

7. Persentase berita yang paling banyak seimbang adalah *Media Indonesia* (62,3%), kemudian *Jawa Pos* (60%), dan *Republika* (51,3%). Untuk ukuran ini, yang paling buruk adalah *Harian Surya* (34,7%) kemudian disusul *Kompas* (38,7%) dan *Suara Merdeka* (44%). Namun perlu diingat ukuran ini adalah ukuran yang murni kuantitatif yang hanya dilihat dari jumlah nara sumber yang dipakai.
8. *Harian Surya* merupakan koran yang paling beragam nara sumbernya, yaitu dari *elite* pemerintahan hingga mahasiswa dan rakyat biasa. Disusul *Republika*, kemudian *Kompas*, *Suara Merdeka*, *Suara Pembaharuan*, dan *Media Indonesia*. Yang paling kontroversi adalah *Jawa Pos*. *Harian* ini tidak pernah dalam *headline* yang teliti memberikan porsi nara sumber pada mahasiswa dan rakyat biasa. Tapi koran ini banyak memberi kesempatan pada para akademisi sebagai nara sumber jauh melebihi porsi yang sama yang diberikan oleh harian lain.
9. Sebagian besar harian memuat identitas nara sumbernya. *Suara Pembaruan*, *Jawa Pos*, *Republika*, dan *Pikiran Rakyat* secara mutlak (100%) semua nara sumber yang berkomentar dalam pemberitaan mereka diberi informasi tentang identitasnya. Sedangkan *Kompas* ada 6% yang tidak dicantumkan nara sumbernya. Sedangkan *Suara Merdeka* ada 5,6% tanpa identitas nara sumber, kemudian *Surya* sebesar 2,5% tanpa identitas nara sumber. Media yang paling banyak menggunakan nara sumber bukan pelaku langsung adalah *Jawa Pos*

(28,5%), kemudian *Harian Surya* (26,5%), dan *Media Indonesia* (17,8%). Yang paling sedikit adalah *Pikiran rakyat* (2,1%), *Suara Merdeka* (2,9%), *Republika* (5,6%), *Suara Pembaruan* (8,7%), kemudian Kompas (10,3%). Tentu saja media atau harian yang banyak menggunakan nara sumber bukan para pelaku langsung berarti media tersebut tidaklah bersedia untuk terlalu rumit dalam mencari informasi. Mereka juga boleh dikatakan kurang "independen" dalam hal memotret realitas, karena lebih menggantungkan pada nara sumber formal, yang berdasarkan jabatan atau akses pada informasi.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang sifatnya kuantitatif ini sebaiknya disertai dengan penelitian kualitatif yang mengkhhususkan pada aspek tekstual analisis, dan kebahasaan secara menyeluruh. Karena hanya dengan kuantitatif murni ini, penelitian ini hanya mampu menyajikan pesan-pesan yang tampak atau manifest saja, sehingga tidak mampu memberikan pemaknaan yang mendalam, apalagi mencoba menghubungkan dengan konteks setting dan ideologi medianya sendiri.
2. Kebijakan redaksional hanya dapat dilihat dari produksi kata-kata dan bahasa yang disajikan dalam memotret realitas. Sementara mengapa institusi media massa ini memproduksi pesan sedemikian rupa untuk mempacanya belum

mampu untuk dilakukan dalam penelitian kuantitatif murni ini. Hanya berdasarkan pada angka temuan saja yang nampak atau berhasil terdokumentasi.

3. Untuk kepentingan pragmatis, penelitian ini menyarankan kepada media massa yang masih belum mampu memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan jurnalistik obyektif, diharapkan segera mengaplikasikannya. Mengingat peran media sebagai pemberi informasi haruslah kredible dan benar-benar dapat diandalkan oleh khalayak pembaca. Sehingga kemungkinan bahwa media melakukan provokasi atau media menjadi salah satu penyulut konflik dapat dihindarkan. Apalagi jika media telah menimbulkan false consiousness pada benak khalayak.
4. Barangkali masih amat sulit bagi media untuk menerapkan prinsip jurnalisme obyektif, mengingat persaingan atau era kompetisi saat ini sangat tinggi. Sehingga kepentingan bisnis atau pasar lebih mengedepan dibandingkan kepentingan membangun moral. Namun paling tidak ada upaya yang harus dilakukan oleh media di Indonesia untuk paling tidak mendekati konsep jurnalisme obyektif, dengan mengurangi kadar penciptaan opini sepihak media daripada pembeberan fakta itu sendiri. Karena demokratisasi pers harus diikuti dengan pelaksanaan prinsip-prinsip obyektifitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Burke, Keneth, *Language as Symbolic Action*, 1966, Barkley, University of California Press.
- Dahlan, Alwi, 1993, *Kemandirian Editorial*, dalam Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari, Penerbit Surabaya Post, Surabaya.
- DeFleur, Melvin., & Ball Rokeach, Sandra, 1994, *Understanding of Mass Communication*, Longman Inc, New York.
- Eryianto, 1999, *Metodologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat*, PT Remadja Rosda, Karya, Bandung.
- Kerlinger, Fred., 1975, *Foundation of Behavior Research*, Rinehart & Winston, New York.
- McQuail, Denis., 1994, *Mass Communication Theories*, Fourth editions, Sage Publications, London.
- Meyer, Philip., 1973, *Precision Journalism: A Reporter's Introduction to Social Science Methods*, Bloomington, Indiana University Press.
- Scramm, Wilbur., & Roberts, F Donald., 1974, *The Process and Effect of Mass Communication*, University of Illinois Press, Urbana.
- Siebert, Fred., Petersen, & Schramm, Wilburr, 1986, *Empat Teori Pers*, Gramedia, Jakarta.
- Strentz, Herbert., 1993, *Reporter dan Sumber Berita: Persekongkolan dalam Mengemas dan Menyesatkan Berita*, Gramedia, Jakarta.
- Suseno, Franz, Magnis, 1986., *Kuasa dan Moral*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Wimer, Roger, D., & Dominick, Josep, R., 2000, *Mass Media Research*, Six Edition, Wadsworth Publishing Company, New York.

PAMERAN

1 MAR 2003